

## **Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa**

Sutan Syahrir Zabda  
Dosen PPKN-FKIP UMS  
e-mail:  
[ssz196@ums.ac.id](mailto:ssz196@ums.ac.id)

### **Abstract**

The problems discussed in this paper were; 1) why the Pancasila (the five Indonesian National Principles) values had not been fully understood and acted in the Indonesian, 2) how Pancasila Values could be revitalised so that it could be characteristically internalised in the daily society activities. Based on the deep review from some theories, the conclusions were: 1) the tentative manners were the main problems of unimplemented Pancasila values in the most Indonesian. 2) The Pancasila values must be revitalised through seriously dissemination process with the appropriate strategies and scientifically instead of doctrine. Every effort of Pancasila values internalisations must use persuasion approach.

Keywords : Pancasila values, Philosophy, Nation

### **PENDAHULUAN**

Ada yang salah dalam kehidupan masyarakat modern kita saat ini, halmana gejala menunjukkan bahwa kita sebagai penghuni bumi ini seharusnya menjadi khalifah bumi yang tugasnya mengelola dan memelihara, namun justru manusia menjadi penghancur rumah bumi kita sendiri. Perilaku kebiasaan tersebut berkontribusi terhadap degradasi atau kerusakan lingkungan fisik dan lenyapnya bentuk kehidupan yang sangat berharga / bernilai.

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi perilaku banyak orang dari semua lapisan masyarakat bahkan semakin merajalela dan sulit mengontrolnya. Di jalan-jalan telah banyak menjadi tempat-tempat berbahaya di mana predator atau pemangsa berkeliaran mengintai remaja dan terjebak dalam telikungan

yang menjerat para remaja didorong untuk menjual tubuh mereka dengan imbalan obat-obatan/narkoba.

Di sisi lain orang tua sudah banyak yang kehilangan kontrol terhadap putera-putera mereka atau keturunan mereka. Sudah sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa pertikaian antar remaja hanya karena perkara sepele, anak saling mangsa satu sama lain. Terlalu banyak bayi yang lahir dari ibu menikah usia remaja bahkan di luar nikah akibat pergaulan bebas, seks bebas yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan yang berharga. Terlalu banyak anak muda yang menipu dan melanggar hukum tanpa penyesalan. Terlalu banyak media berita kita justru mengajarkan generasi muda menjadi pahlawan pahlawan maya yang dimplementasikan dalam perilaku kekerasan, pragmatis,

berpikir pendek, sikat dulu urusan belakang, mereka menjadi budak industri dunia maya, sehingga para remaja asik dengan dirinya sendiri dalam permainan *games on line*, pornografi dan lain sebagainya. Hal ini membuat generasi muda pasif, reksioner negatif, dan tidak kreatif positif.

Terlalu banyak para pemimpin atau tokoh politik, para profesional dan bisnis telah meninggalkan etika, menghalalkan cara demi tujuan. Banyak fakta yang membuktikan perilaku pemimpin kita yang mengabaikan nilai dan etika disegala bidang seperti: bidang politik para politisi kita banyak yang mengabaikan etika berpolitik, dalam bidang ekonomi, sudah bukan rahasia lagi para pembisnis melanggar etika bisnis; dalam bidang sosial sudah terlalu banyak para tokoh, para remaja, bahkan awam yang mengabaikan etika sosial, tidak ada lagi sopan dan santun dalam pergaulan sehari-hari, semua dihitung pada keuntungan materi semata.

Gejala di atas melahirkan pertanyaan, bahwa Apakah gejala perilaku masyarakat mengisyaratkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi landasan moral etik sudah tidak ada. Secara sosiologis, setiap masyarakat memiliki tata nilai mereka sendiri. Secara kebangsaan, Indonesia masih tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa, sebagai *way of life*, namun kenyataannya nilai-nilai Pancasila belum mencerminkan karakter dan perilaku kehidupan bermasyarakat dan berbangsa tidak sesuai antara *dass sollen* dan *dass sein* antara idealisnya dengan kenyataannya.

Permasalahan yang muncul dalam tulisan ini adalah:

Mengapa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia?

Bagaimana Nilai-nilai Pancasila dapat direvitalisasi agar dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkarakter?

### ARGUMEN TEORITIS

Gejala dalam masyarakat di atas menurut Pat Duffy Hutcheon sebagaimana dinyatakannya di bawah ini:

*There is a dawning recognition among ordinary people that something is dreadfully wrong in modern industrial society. We are destroying our earthly home. Too many of our habitual behaviors contribute to the degradation of our physical surroundings and the disappearance of valuable forms of life. We are losing control of our lives. Too many people from all walks of life are abusing drugs. We are losing control of our cities. Too many of our streets have become dangerous places where predators lurk in the dark and pre-adolescents are encouraged to sell their unformed bodies in return for drugs. We are losing control of our offspring. Too many children prey on one another, with guns and knives. Too many babies are being born to unwed teen-aged mothers. We are losing the precious core of values necessary for keeping any*

*society workable. Too many youngsters cheat and break the law without compunction. Too many of our news media make heroes of ruthless commercial exploiters and serial murderers. Too many of our political leaders and professional and business people have abandoned ethics (Hutcheon,1999:1).*

Eric Fromm menyatakan bahwa perkembangan Eropa sebagai perkembangan peradaban modern, yang berpangkal pada timbulnya kebebasan (*freedom*) yang terjadi pada level individu maupun masyarakat (Budimansyah,2010:14). Lebih lanjut From menyatakan bahwa pada level individu kebebasan itu diawali timbulnya “diri” (*self*) dalam proses individuasi sejak lahir, sedang pada level masyarakat, kebebasan menentukan perkembangan kepribadian melalui proses individuasi sepanjang sejarah, seperti yang dialami masyarakat Barat sebagai hasil perjuangan kebebasan individu (Budiman,201). Kebebasan Individu dalam dimensi masyarakat mengakibatkan lepasnya ikatan-ikatan nilai dalam masyarakat atau kelompok. Lepasnya individu dengan nilai-nilai kemasyarakatannya berakibat pada munculnya pribadi anggota masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan seperti: kegelisaan (*anxiety*), perasaan kesendirian (*aloneness*). Perasaan tercabut dari akar kemasyarakat, berkembangnya perasaan saling curiga, *negative prejudice* dengan orang lain atau kelompok lain yang berujung pada saling permusuhan (*hostility*).

Gejala tersebut di atas sebenarnya dapat berpangkal pada kegagalan dalam proses pembangunan karakter bangsa. (Hutcheon,1999) menyatakan:

*“In the face of all this it may seem trite to say that it all comes down to a matter of character, and how that character is formed, and to a matter of culture, and how that culture is formed. But it is true. Character and culture are what it is all about. Until we understand what it means to be a human being capable of acquiring a character and participating in and contributing to a culture, .....”*

Pernyataan Hutcheon di atas walau mungkin pernyataan klise, bahwa itu semua bermuara pada soal karakter, dan bagaimana karakter yang terbentuk, dan masalah budaya, dan bagaimana budaya terbentuk. Tapi itu memang benar, itulah kenyataannya. Semua tentang Karakter dan budaya sehingga kita memahami apa artinya menjadi manusia yang cakap memiliki karakter dalam/dan berpartisipasi dalam dan memberikan kontribusi untuk berbudaya. Penulis sependapat bahwa persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kontek krisis peradaban di atas lebih karena bangsa Indonesia sudah atau sedang mengalami krisis atau degradasi karakter bangsa.

### **Membangun Karakter Bangsa Indonesia**

Membangun karakter bangsa sebenarnya sudah terpikirkan oleh bangsa Indonesia melalui para the *founding father* nya jauh sebelum

bangsa Indonesia merdeka. Bung Karno amat sering menyampaikan pentingnya membangun karakter bangsa (*nation character building*). Awal rintisan membangun bangsa Indonesia sebelum sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dalam lagu kebangsaan hasil gubahan WR Supratman Indonesia raya menyatakan bahwa Indonesia Raya dapat dibangun melalui membangun jiwanya. Simaklah bunyi syair lagu Indonesia Raya “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”. Syair lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut tidak cukup cuma dinyanyikan melainkan ditindak lanjuti dengan aksi membangun bangsa ini mulai dari membangun Jiwa atau karakter Bangsa. Namun, yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam pembangunannya justru dimulai dan menitik beratkan pada aspek fisik material. Dan tidak aneh kalau hasilnya adalah lahirnya anak-anak bangsa yang berorientasi pada faktor fisik material, individualistis. Hal ini tercermin dalam kurikulum Pendidikan Nasional, bahkan dalam Ujian Nasionalnya. Artinya, walau amanat para pendiri bangsa mengedepankan pembangunan karakter bangsa, namun yang dilakukan bangsa ini justru aspek fisik material.

### **Pengertian dan Konsep Membangun Karakter Bangsa**

Berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan dikenal tiga kompetensi yaitu: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan / *civic disposition* (Budimansyah, 2010)

atau *character*. Pengetahuan kewarganegaraan berkenaan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh seorang warganegara mengenai negaranya seperti kehidupan politik, undang-undang kewarganegaraan, pemerintahan, konstitusi dan seterusnya. Kecakapan kewarganegaraan berkenaan dengan kecakapan intelektual, kecakapan emosional dan kecakapan spiritual. Sedang watak kewarganegaraan atau karakter kewarganegaraan/ bangsa berkenaan dengan nilai-nilai unik yang terinternalisasi dan terintegrasi dalam diri seseorang yang melandasi dan mengarahkan sikap dan tindakannya sehingga termanifestasikan dalam perilaku seseorang warganegara. Nilai-nilai unik tersebut dari berasal dari nilai budaya, ajaran agama, atau dasar filsafat yang dimiliki dan disepakati oleh bangsa tersebut.

Furqon (2010:12-13), menulis dalam bukunya Pendidikan Karakter membangun peradaban bangsa bahwa karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nam, reputasi; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dari orang lain; watak, tabi'at, mempunyai kepribadian. Lebih lanjut menurut Furqon, seseorang berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya (Furqon, 2010). Dalam konteks karakter bangsa, maka kualitas mental atau moral, kekuatan moral seseorang warga bangsa mampu berperilaku berbasis nilai dasar bangsa dalam wujud kegiatan hidup dan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara Indonesia di segala bidang..

Oleh karena itu membangun karakter bangsa merupakan proses internalisasi nilai-nilai kehidupan luhur bangsa Indonesia ke dalam jiwa setiap warga bangsa Indonesia sehingga nilai-nilai tersebut terwejantahkan / termanifestasi dalam perilaku bagi pribadi masing-masing dan dan bagi kehidupan bersama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Dalam hal ini, Hutcheon menyatakan:

*“Where does character come from?” The search for answers takes us into the sources of popular beliefs about whether or not people learn to be sinners or saints. Religious and philosophical world views that imply an ethical role for humans in the universe.....(Hutcheon,1999)* (Dari mana karakter berasal? Mencari jawaban membawa kita ke dalam sumber keyakinan populer tentang apakah atau tidak orang belajar untuk menjadi orang berdosa atau orang-orang suci. Pandangan dunia keagamaan dan filosofis yang menyiratkan peran etis untuk manusia di alam semesta.....)

Sedang menurut Dasim, karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan oleh karsa, serta olah raga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan (Budimansyah,1999).

Berkenaan dengan tema atau topik di atas, sudah barang tentu sasaran pembahasan di sini adalah Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia sebagai acuan yang akan direvitalisasi untuk membangun karakter bangsa. Namun, persoalannya adalah bagaimana Pancasila di derivasi dalam implementasinya bagi pembentukan karakter bangsa tersebut. Banyak pendapat dan pemahaman dikalangan para tokoh bangsa ini mengenai Pancasila. Baik dari aspek sejarah, politik, yuridis, maupun aspek kultural. Oleh karena menyepakati lebih dahulu konsep revitalisasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia harus dilakukan secara terbuka namun berada dalam koridor *staatsside* yang digagas oleh para pendiri negara yang menginginkan Dasar falsafah Pancasila sebagai dasar pemikiran filsafati dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia baik untuk kekinian maupun untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia.

### **Mencari jabaran Pancasila dan Implementasinya.**

Menjabarkan Pancasila ke dalam implementasinya untuk membangun karakter bangsa adalah bagian upaya merevitalisasi Pancasila ke dalam bentuk fungsional dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Dengan kata lain menjadikan Pancasila sebagai paradigma karakter bangsa. Keberadaan Pancasila dapat dilihat dari dua sudut, pertama secara historis dan secara kultural. Kaelan yang mengutip pendapat Notonagoro menyatakan bahwa **“Secara historis**

Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan YME, berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati-dirinya sendiri. **Secara kultural** dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara” (Kaelan,2011:8).

Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia(Kaelan,2011) yang kemudian disintesiskan secara dialektis kemudian dituangkan ke dalam sebuah dasar negara yang sering disebut sebagai dasar falsafah negara (*staats filosofische grondslag*).

Pancasila yang sebab materialnya (*causa materialis*) bersumber pada bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa ini, menurut Kaelan yang meminjam meminjam istilah Margareth Mead,

Ralp Linton, dan Abraham Kardiner dalam *Anthropology to Day*, disebut sebagai *National Character*. Selanjutnya Linton lebih condong dengan istilah *Peoples Character*, atau dalam suatu negara disebut sebagai *National Identity* (Kaelan,2011) , sehingga nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius yang telah ada pada bangsa Indonesia, kemudian dibahas dan dirumuskan oleh *the founding fathers* bangsa Indonesia, yang kemudian disepakati dalam suatu konsensus sebagai dasar hidup bersama dalam suatu negara Indonesia.

Sebagai dasar falsafah, Pancasila yang merupakan suatu pilihan bangsa Indonesia melalui *The Founding Fathers* adalah *core philosophy* bangsa Indonesia, bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang **secara yuridis** tercantum dalam tertib hukum Indonesia, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Dalam pengertian seperti ini nilai-nilai Pancasila merupakan *das sollen* bagi bangsa Indonesia, sehingga seluruh derivasi normatif dan praksis berbasis pada nilai-nilai Pancasila(Kaelan,2007:10). Dalam kedudukannya yang demikian ini, maka Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan suatu cita-cita hukum (*Rechtsidee*), yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Sebagai cita-cita

hukum Pancasila merupakan konstruksi pikir yang merupakan suatu keharusan untuk mengarahkan hukum dan perilaku masyarakat kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, integritas Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi asas kerohanian bangsa harus dijadikan basis dan inti dalam membangun karakter bangsa (*nation and haracter building*) yang sinergi dengan sistem pembangunan nasional(Syam,2009).

Mengingat pembangunan karakter harus bersifat berlanjut terus menerus (*sustainable*), maka nilai yang dijadikan paradigma karakter haruslah nilai (*values*) yang bersifat berlanjut. Membangun karakter merupakan pembangunan manusia,, maka *sustainable values* merupakan *core* dari pembangunan adalah Pancasila sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut(Sastraprteja,1998:72):

1. Hormat menghormati terhadap keyakinan regius orang lain
2. Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subyek yang tidak boleh direduksi sebagai obyek.
3. Kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segala sektarianisme
4. Nilai-nilai terkait dengan demokrasi konstitusional
5. Keadilan sosial persamaan (*equity*) dan (*equity*)

Dalam kontek revitalisasi Pancasila tersebut, akan lebih efektif jika terimplementasikan dalam bentuk budaya perilaku masyarakat.

Dengan demikian membangun karakter bangsa berbasis falsafah Pancasila adalah menjadikan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perilaku hidup dan kehidupan setiap orang anggota masyarakat. Jika nilai Pancasila telah terimplementasi dalam karater setiap orang, secara outmatif membudaya dalam perilaku masyarakat bangsa, dan penyelenggara negara.

Persoalannya adalah, bagaimana wujud kongrit nilai-moral Pancasila tersebut yang secara universal dapat dilaksanakan. Lima Sila dari Pancasila diderivasikan ke dalam bentuk nilai operasional yang secara aplikatif dapat dilaksanakan. Dulu di zaman orba, ada eka persetya pancasikarsa pernah dirinci menjadi tiga puluh enam butir; bahkan juga pernah dirinci menjadi 45 butir. Secara tentatif, rumusan operasional nilai Pancasila dapat saja disusun dan *debatable*.

Sila Ketuhanan Yang Mahaesa, dapat dioperasionalkan seperti: setiap orang Indonesia seharusnya beriman kepada Tuhan Yang Mahaesa, yang wujud perilakunya adalah menjalankan perintah ajaran agamanya masing, bertoleransi terhadap orang lain yang menjalani ajarannya agamanya. Kemudian mengamalkan ajaran agama betul memberi manfaat baagi kepentingan orang lain/banyak. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam bentuk perilaku yang saling menghargai harkat dan martabat manusia, kesamaan dalam kemasyarakatan dan hukum, saling mengasihi, dan menyayangi satu sama lain hingga mewujudkan kondisi yang serasi selaras dalam

masyarakat. Sila Persatuan Indonesia, diwujudkan tiadanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesediaan bekerjasama untuk kepentingan bersama, bergotong royong, rela berkorban, senantiasa sama berupaya menciptakan kerukunan, mencitai tanah air dengan cara mencintai karya bangsa sendiri, dan lain-lain. Sila Kerakyatan yang dipimpin leh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila itu diwujud ke dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi substansial, dan tidak memaksakan kehendak, dan seterusnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain, karya cipta orang lain, mengedepankan kewajiban kemudian hak yang dilaksanakan secara seimbang.

Sekali lagi bentuk perilaku di atas masih bersifat tentatif, dan dapat dirinci lebih detil lagi sehingga betul-betul menjadi pedoman perilaku sebagai kaarakter setiap anak bangsa. Dalam implementasinya, pedoman tersebut harus bersifat penuntun perilaku bukan perilaku paksaan, harus bersifat manusia, sesuai dengan kodrat manusia, serta selaras

dalam implementasi manusia sebagai indidu dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tersebut perlu direvitalisasikan melalui proses deseminasi secara serius dan menggunakan strategi metode pendekatan yang tepat dan rasional ilmiah, bukan indoktrinasi. Jangan pernah ada unsur pemaksaan, melalinkan pendekatan persuasive educkatif

Disamping itu, praktek kehidupan dalam segala bidang tercerminkan dalam etika setiap orang dan kelompok. Misal nilai kejujuran adalah selaras dengan Nilai Pancasila. Oleh karena itu dalam bidang politik, maka etika politik melahirkan perilaku politik yang jujur. Dalam bidang ekonomi, jujur dalam berbisnis, dalam sosial jujur sehingga dapat dipercai oleh sesama, dalam bidang hukum, jujur dalam penegaakan hukum, maka tercegah mafia hukum, dalam bidang hankam, bahwa jujur melahirkan kepercayaan masyarakat pada penegak hukum, dan seterusnya.

Tuntunan operasional tersebut di atas perlu dikaji secara bersama dan terbuka sehingga hasil rumusan operasional nilai Pancasila dapat diterima oleh semua laapisan masyarakat bangsa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim, 2010, *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.,
- Furqon Hidayatullah, 2010, *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*, Surakarta: UNS Press.
- Hutcheon, Pat Duffy, 1999, *Building Character dan Culture*, London: Greenwood Publishing Group, Inc.

- Kaelan, 2011, *Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: Sarasehan Nasional Pancasila, Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei 2011
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Sastraprteja, M., 1998, Pancasila sebagai Etos Pembangunan Nasional, Jurnal Filsafat Pancasila: *Nasionalisme dalam Perspektif Historis, Politis, Yuridis, dan Filosofis*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada
- Syam, Mohammad Noor, 2009, Sistem Filsafat Pancasila (Tegak sebagai sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 1945, dalam Kongres Pancasila: *Pancasila dalam berbagai Perspektif*, Jakarta: Setjend MK RI